BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Aturan hukum di Indonesia tentang pemberantasan korupsi saat ini lebih mengutamakan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi dan tidak memprioritaskan mengenai pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi. Belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pengembalian aset menimbulkan kendala untuk dapat dilakukannya perampasan aset dari pelaku tindak pidana korupsi. Kontruksi dan instrumen dalam sistem hukum Indonesia saat ini pun masih belum memadai dan masih memiliki kelemahan terutama dalam hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, serta hukum adminsitratif sehingga perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak akan dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif apabila perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana yang menjadi landasan atas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
- 5.1.2. Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam undang-undang tersebut di jelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Secara garis besar, pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2, Pertama, yaitu Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua, yaitu Pidana tambahan yang berupa Pencabutan hak-hak tertentu, Pembayaran uang

pengganti, Lelang atau sita aset bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah diputuskan.

5.2. Saran

- 5.2.1. Upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum Indonesia adalah dimulai dari substansi hukum, konstruksi hukum dan instrumen hukum yang mengatur tentang perampasan dan pengembalian aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya aturan khusus sebagai landasan dan dasar hukum kepada penegak hukum dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- 5.2.2. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara harus lebih di pertegas lagi dan dalam penegakan hukumnya pemerintah harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. Pemidanaan terhadap koruptor tidak relevan lagi jika hanya dipenjara, tanpa adanya pengembalian atas kerugian Negara. Oleh karena itu diperlukan kesatuan kordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kedepan pengaturan tentang norma hukum pidana tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus selaras dan menyatu dalam suatu produk perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.